

## Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota Tarakan tahun 2009-2019

Aan Digita Malik

Universitas Borneo, Tarakan.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tarakan. Data sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian ini Populasi dari penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tarakan dan yang menjadi sampel adalah Laporan Keuangan Tahun 2009-2019. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dan menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi, rasio efisiensi, rasio keserasian keuangan daerah. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2009-2019, rata rata rasio kemandirian adalah 11,41% yang termasuk pada pola hubungan instruktif. Rata-rata rasio derajat desentralisasi sebesar 8,6% yang artinya sangat rendah. Rata-rata rasio efisiensi sebesar 108%, yang termasuk pada kriteria tidak efisien. Rata-rata rasio keserasian belanja operasi sebesar 22,73%, sedangkan rasio keserasian belanja modal sebesar 34,67%. Pola hubungan seluruhnya adalah instruktif, kurang dari 25%. Hal ini menunjukkan ketergantungan Pemerintah Kota Tarakan kepada pemerintah pusat masih tinggi.

**Kata kunci:** Kinerja keuangan; rasio kemandirian; rasio derajat desentralisasi fiskal; rasio efesiensi; rasio keserasian

### *Analysis of Tarakan city's financial performance in 2009-2019*

#### *Abstract*

*This study aims to determine the performance of regional financial management in tarakan city government. Secondary data is the data used in this study The population of this study is the Tarakan City Government Financial Report and the sample is the 2009-2019 Financial Report. The type of research carried out is descriptive research with a quantitative approach, and using documentation methods. The data analysis techniques used are the ratio of independence, the ratio of degrees of decentralization, the ratio of efficiency, the ratio of regional financial harmony. The calculation results show that the performance of regional financial management during 2009-2019, the average independence ratio is 11.41%, which is included in the pattern of instructive relationships. The average efficiency ratio is 108%, which is included in the inefficient criterion. The average ratio of operating expenditure harmony was 22.73%, while the capital expenditure matching ratio was 34.67%. The pattern of the relationship is entirely instructive, less than 25%. This shows that the dependence of the Tarakan City Government on the central government is still high.*

**Key words:** *Financial performance; independence ratio; fiscal decentralization degree ratio; efficiency ratio; the ratio of harmony*

## PENDAHULUAN

Aktivitas pembangunan dan pemerintahan di daerah tentu tak dapat dipisahkan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Kewenangan fiskal yang besar di era desentralisasi sangat menentukan struktur anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah (APBD). Dari substansi sebuah APBD dapat dilihat upaya atau keseriusan suatu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, seberapa besar potensi penerimaan yang akan digali, ke arah mana belanja daerah itu difokuskan, atau dari mana defisit anggaran akan dibiayai. Dari struktur dan porsi belanja daerah dapat diketahui kecenderungan belanja daerah, apakah cenderung pada penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur pemerintahan atau cenderung pada penyelenggaraan pembangunan daerah.

Perilaku pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah akan berpengaruh dalam proses penganggaran daerah. Struktur anggaran daerah mencerminkan besar kecilnya upaya pemerintah daerah dalam pembangunan daerah, terutama jika melihat pada porsi belanja modal. Ditinjau dari perspektif teori keagenan, masalah-masalah keagenan dapat muncul dalam proses penganggaran publik, baik itu masalah antara pemerintah daerah dengan legislatif (DPRD) maupun masalah antara legislatif dengan publik. Munculnya permasalahan keagenan tersebut adalah wajar dalam konteks hubungan antara agen dengan prinsipal, namun diharapkan masalah tersebut didasari oleh altruisme semata untuk kemajuan daerah, pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas, sehingga kinerja keuangan yang baik akan berpengaruh pada struktur anggaran yang condong pada pembangunan daerah.

Tahun 1998 di Indonesia terjadi reformasi pada segala bidang, tidak terkecuali reformasi pada bidang keuangan. Pemerintah melakukan perombakan peraturan keuangan negara dengan mengganti seluruh peraturan yang lama dan bersama Dewan Perwakilan rakyat (DPR) mengeluarkan satu paket peraturan perundang-undangan bidang keuangan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara. Paket undang-undang ini dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di Indonesia.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah seharusnya ditunjukkan pada kemampuan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya yaitu dengan besarnya peranan PAD dalam pembiayaan daerah pada APBD daerah tersebut. Menurut Mardiasmo (2002) masalah yang sering timbul pada upaya peningkatan PAD adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi pendapatan daerah yang akurat, sehingga pendapatan daerah belum dapat dipungut secara optimal.

Pertanggungjawaban kinerja keuangan menuntut pemerintah daerah untuk dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kinerjanya. Penilaian kinerja tersebut harus dapat membrikan informasi yang transparan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut mengontrol kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap hasil dari kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dianggarkan dan direalisasikan (Halim, 2004). Interpretasi atas hasil perhitungan rasio keuangan bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kinerja keuangan antara satu periode dengan periode sebelumnya atau antara satu daerah dengan daerah yang lain untuk melihat perbedaannya.

Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2002). Analisis rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu pos dengan pos lainnya dalam satu laporan keuangan atau antar pos yang ada di antara laporan keuangan (Hery, 2015: 162).

Dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah daerah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Lingkup akuntansi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah yang terdiri atas; akuntansi pemerintahan provinsi dan akuntansi pemerintahan kabupaten atau kota.

Penelitian yang dilakukan Sumarjo (2010) mendefinisikan laporan keuangan sebagai salah satu informasi yang secara formal wajib di publikasikan sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber daya pemilik, serta jendela informasi yang memungkinkan bagi pihak-pihak diluar manajemen, mengetahui kondisi entitas tersebut. Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti Laporan Surplus atau Defisit, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Aliran Kas, Neraca serta Laporan Kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non-finansial (Mardiasmo 2009). Bastian (2006) menyebutkan komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan yang lengkap meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Perubahan Aktiva, Laporan Arus Kas, Perhitungan Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Menurut Mahmudi (2015:9), analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan, dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Menurut Brigham dan Houston (2001: 426), untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan suatu perusahaan, perlu dilakukan suatu interpretasi atau analisis terhadap data keuangan dari perusahaan yang bersangkutan, dan data keuangan itu akan tercermin dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan melaporkan baik posisi perusahaan pada suatu waktu tertentu maupun operasinya selama beberapa periode yang lalu. Akan tetapi nilai riil dari laporan keuangan adalah fakta bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membantu memprediksi laba dan dividen masa depan.

Menurut Halim (2007) analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain adalah (1) Rasio Kemandirian, (2) Rasio Derajat Desentralisasi (3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (4) Rasio Keserasian

## **METODE**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat Deskriptif. karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran, memaparkan, serta melaporkan suatu keadaan, obyek atau suatu peristiwa, dan membandingkannya dari tahun ke tahun. Menurut Sugiyono (2012:13), Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain. Dalam hal ini untuk mendapatkan gambaran tentang kinerja keuangan Pemerintah Kota Tarakan dapat dilakukan dengan menalisis rasio keuangan.

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif (Quantitative Approach), yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada pengujian teori-teori atau konsep melalui pengukuran variabel dan prosedur analisis data dengan peralatan statistik untuk menguji hipotesis. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data yang objektif, valid, dan reliable dengan menggunakan data yang terbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2011).

### **Jenis Data**

Data yang dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara mencatat atau mendokumentasikan data yang berkaitan dengan penelitian yang di lakukan yaitu berkaitan kinerja keuangan pemerintah Kota Tarakan Tahun 2009 sampai dengan 2019.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, seperti menghimpun informasi juga data melalui studi pustaka, laporan keuangan pemerintah Kota Tarakan, data dari Badan Pusat Statistik Kota Tarakan.

### Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan Pemerintah Kota Tarakan dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2019. sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari populasi yang telah ditentukan yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tarakan tahun 2009 sampai dengan Tahun 2019.

### Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif komparatif. Data yang berasal dari APBD dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tarakan dianalisis dengan menghitung beberapa rasio keuangan diantaranya Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Belanja Modal dan Rasio Belanja Operasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tarakan dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pemkot Tarakan dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2009-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari laporan keuangan pemerintah daerah kota Tarakan yang diperoleh dari Pemerintah Kota Tarakan dan Badan Pusat Statistik Kota. Hasil dalam laporan keuangan tersebut dianalisis lebih lanjut dalam bentuk hasil analisis rasio-rasio keuangan. Adapun hasil analisisnya sebagai berikut :

### Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian dapat dihitung dengan menggunakan rumus

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}}$$

**Tabel 1.**  
Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
2009	102.985.154	566.157.318	18,19%	Instruktif
2010	79.590.331	714.518.538	11,14%	Instruktif
2011	68.801.769	1.000.184.769	6,88%	Instruktif
2012	80.711.786	1.210.238.703	6,67%	Instruktif
2013	94.195.832	1.078.928.386	8,73%	Instruktif
2014	92.878.376	1.061.511.698	8,75%	Instruktif
2015	76.462.510	491.424.389	15,56%	Instruktif
2016	62.204.040	701.347.008	8,87%	Instruktif
2017	67.092.417	585.786.873	11,45%	Instruktif
2018	98.571.841	721.237.212	13,67%	Instruktif
2019	132.680.780	850.402.292	15,60%	Instruktif

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, kemampuan kinerja keuangan Kota Tarakan ditinjau dari rasio kemandirian sangat rendah dan pola hubungannya adalah pola instruktif artinya semakin rendah persentase tingkat kemandirian maka semakin besar peranan pemerintah pusat dalam struktur pendapatan daerah yang artinya pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah. Presentase tingkat rasio kemandirian keuangan daerah terbesar pada tahun 2009 yaitu sebesar 18,19% dan terendah pada tahun 2012 sebesar 6,67%. Rata-rata rasio kemandirian adalah 11,41%, hal ini menggambarkan bahwa terdapat pola hubungan yang instruktif yang dimana peranan pemerintah pusat sangat mendominasi posisi keuangan pemerintah daerah kota Tarakan.

Menurut Mahsum dalam Dwijyanti dan Ruserlistyanti (2013), kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah (selanjutnya disebut "Rasio KKD") menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan,

pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan, kemampuan keuangan Kota Tarakan ditinjau dari rasio kemandirian sangat rendah dan pola hubungannya adalah pola instruktif artinya semakin rendah persentasi tingkat kemandirian maka semakin besar peranan pemerintah pusat dalam struktur pendapatan daerah yang artinya pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah. Rasio Kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kota Tarakan dalam membiayai pelaksanaan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung dari bantuan pusat. Jadi Kemandirian keuangan Kota Tarakan secara keseluruhan dapat dikatakan sangat rendah sekali, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya.

### Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan.. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

**Tabel 2.**  
Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Rasio Derajat Desentralisasi	Pola Hubungan
2009	102.985.154	740.798.248	13,90%	Sangat Rendah
2010	79.590.331	978.973.349	8,13%	Sangat Rendah
2011	68.801.769	1.257.332.382	5,47%	Sangat Rendah
2012	80.711.786	1.588.503.453	5,08%	Sangat Rendah
2013	94.195.832	1.465.859.772	6,43%	Sangat Rendah
2014	92.878.376	1.350.248.658	6,88%	Sangat Rendah
2015	76.462.510	678.822.211	11,26%	Sangat Rendah
2016	62.204.040	1.014.646.597	6,13%	Sangat Rendah
2017	67.092.417	777.972.236	8,62%	Sangat Rendah
2018	98.571.841	880.366.194	11,20%	Sangat Rendah
2019	132.680.780	1.095.569.688	12,11%	Sangat Rendah

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, kemampuan kinerja keuangan Kota Tarakan ditinjau dari rasio desentralisasi sangat rendah. Hal ini dibuktikan dari hasil perhitungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Daerah, yang dimana menunjukkan bahwa rata-rata rasio desentralisasi antara tahun 2009-2019 adalah 8,66%. Hal ini menunjukkan bahwa PAD kota Tarakan masih sangat minim dalam porsi struktur keuangan kota Tarakan.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi Kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Dari hasil perhitungan memberikan gambaran bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Tarakan ditinjau dari rasio derajat desentralisasi sangat rendah, artinya dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan masih sangat tergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi setempat. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kota Tarakan diharapkan untuk berupaya meningkatkan PAD yang dengan mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada maupun menggali potensi-potensi yang baru.

### Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Adapun rumus menghitung rasio efisiensi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}$$

**Tabel 3.**

Tahun Anggaran	Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah			
	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	Pola Hubungan
2009	968.689.813	740.798.248	131%	Tidak Efisien
2010	1.171.055.157	978.973.349	120%	Tidak Efisien
2011	1.119.934.708	1.257.332.382	89%	Efisien
2012	1.241.882.861	1.588.503.453	78%	Efisien
2013	1.786.862.222	1.465.859.772	122%	Tidak Efisien
2014	1.677.056.631	1.350.248.658	124%	Tidak Efisien
2015	861.395.298	678.822.211	127%	Tidak Efisien
2016	927.821.143	1.014.646.597	91%	Efisien
2017	785.360.232	777.972.236	101%	Tidak Efisien
2018	880.654.611	880.366.194	100%	Efisien Berimbang
2019	1.096.769.688	1.095.569.688	100%	Efisien Berimbang

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, kemampuan keuangan Kota Tarakan ditinjau dari rasio efisiensi keuangan daerah dapat dikatakan tidak efisien. Hal ini digambarkan dari hasil perhitungan antara realisasi belanja dan realisasi pendapatan daerah. Rata-rata dari hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah kota Tarakan dari tahun 2009-2019 adalah 108%.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya.

Berdasarkan hasil perhitungan yang ada, kemampuan keuangan Kota Tarakan ditinjau dari rasio efisiensi keuangan daerah dapat dikatakan tidak efisien. Hal ini digambarkan dari hasil perhitungan antara realisasi belanja dan realisasi pendapatan daerah masih lebih besar antara jumlah belanja dan jumlah pendapatan yang diterima oleh pemerintah Kota Tarakan. Oleh krena itu penting untuk mengefisienkan antara belanja suatu daerah dengan pendapatan daerah tersebut.

### Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Ada dua perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

Rasio Belanja Operasi

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Adapun rumus perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

**Tabel 4.**  
Hasil Perhitungan Rasio Belanja Operasi

Tahun Anggaran	Total Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Rasio Keserasian Belanja Operasi
2009	196.532.862	968.689.813	20,29%
2010	197.390.212	1.171.055.157	16,86%
2011	271.123.508	1.119.934.708	24,21%
2012	289.501.761	1.241.882.861	23,31%
2013	420.327.983	1.786.862.222	23,52%
2014	323.772.570	1.677.056.631	19,31%
2015	238.623.353	861.395.298	27,70%
2016	220.041.449	927.821.143	23,72%
2017	208.849.790	785.360.232	26,59%
2018	192.566.449	880.654.611	21,87%
2019	247.925.893	1.096.769.688	22,61%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio keserasian belanja operasi pemerintah Kota Tarakan dari tahun 2009-2019 berada dikasaran rata-rata 22,73%. Ini menggambarkan bahwa ada 22,73% belanja operasi dari keseluruhan total belanja pemerintah Kota Tarakan

#### Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Adapun rumus perhitungannya sebagai berikut

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

**Tabel 5.**  
Hasil Perhitungan Rasio Belanja Modal

Tahun Anggaran	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Keserasian Belanja Modal
2009	424.319.322	968.689.813	43,80%
2010	461.925.532	1.171.055.157	39,45%
2011	354.912.070	1.119.934.708	31,69%
2012	445.638.609	1.241.882.861	35,88%
2013	843.228.599	1.786.862.222	47,19%
2014	855.742.526	1.677.056.631	51,03%
2015	128.719.307	861.395.298	14,94%
2016	236.549.635	927.821.143	25,50%
2017	178.624.060	785.360.232	22,74%
2018	255.417.706	880.654.611	29,00%
2019	440.535.794	1.096.769.688	40,17%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio keserasian belanja modal pemerintah Kota Tarakan dari tahun 2009-2019 berada dikasaran rata-rata 34,67%. Ini menggambarkan bahwa ada 34,67% belanja modal dari keseluruhan total belanja pemerintah Kota Tarakan.

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal secara Optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Operasi berarti persentase Belanja Modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

Menurut perhitungan di atas bahwa sebageian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih di prioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi dan lain-lain sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja modal yang lebih kecil dibandingkan dengan rasio total

belanja. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa pemerintah kota Tarakan yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintah dan belum menitikberatkan pembangunan daerah. Hal ini karena belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk pemerintah Kota Tarakan tergolong kecil atau belum terpenuhi.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kinerja keuangan pemerintah kota Tarakan ditinjau dari rasio kemandirian sangat rendah dan pola hubungannya adalah pola instruktif artinya semakin rendah persentasi tingkat kemandirian maka semakin besar peranan pemerintah pusat dalam struktur pendapatan daerah yang artinya pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah;

Kemampuan kinerja keuangan pemerintah kota Tarakan ditinjau dari rasio desentralisasi sangat rendah. Hal ini dibuktikan dari hasil perhitungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Daerah, yang dimana menunjukkan bahwa rata-rata rasio desentralisasi antara tahun 2009-2019 adalah 8,66%. Hal ini menunjukkan bahwa PAD kota Tarakan masih sangat minim dalam porsi stuktur keuangan pemerintah kota Tarakan;

Kemampuan kinerja keuangan pemerintah kota Tarakan ditinjau dari rasio efesiensi keuangan daerah dapat dikatakan tidak efisien. Hal ini digambarkan dari hasil perhitungan antara realisasi belanja dan realisasi pendapatan daerah masih lebih besar antara jumlah belanja dan jumlah pendapatan yang diterima oleh pemerintah Kota Tarakan. Oleh krena itu penting untuk mengefisiensikan antara belanja suatu daerah dengan pendapatan daerah tersebut; dan

Kemampuan kinerja keuangan pemerintah kota Tarakan ditinjau dari rasio keserasianvmenunjukkan bahwa pemerintah kota Tarakan yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintah dan belum menitikberatkan pembangunan daerah. Hal ini karena belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi dan lain-lain yang mengakibatkan belanja modal untuk pemerintah kota Tarakan tergolong kecil atau belum terpenuhi.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Armaja, dkk, "Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan," dalam Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol. 3, No. 2 (September, 2015), 170
- Bastian, Indra. 2009. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta : Penerbit BPFE.
- Dewi SPA dan Fajar Harimurti, "Pengaruh Pengawasan Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar" dalam jurnal Eksplorasi, Volume XXIX, No.2 (Februari-2017), 166
- Dwijayanti, R dan Ruserlistyanti.2013. Analisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah propinsi Se-Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 12No.01
- Halim, A. Akuntansi Sector Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. (Jakarta:SalembaEmpat, 2007)
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta:.Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2009. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba empat
- Hendaryadi, S.2011. Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Antara Tahun 2008-2009.
- Hery. 2015. Analisis Laporan Keuangan Pendekatan Rasio Keuangan. CAPS, Yogyakarta
- Karlina Anis dan Handayani Nur, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015" dalam Jurnal: Ilmu Dan Riset Akuntansi, Vol. 6, No. 3 (Maret, 2017), 916
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI
- Marina F. Pandjaitan, dkk. "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2011-2016." Jurnal Emba, Vol.6 No.3, 2018: 1399.
- Susilowati, dkk, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2013-2015, " dalam Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, Vol. 12, No. 2 (Juni, 2016), 232